

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

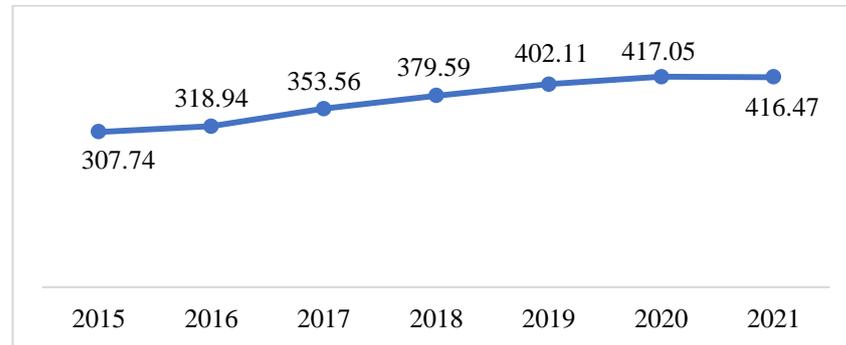
Meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik merupakan keharusan bagi setiap negara. Dalam melaksanakan pembangunan nasional setiap negara membutuhkan modal yang cukup besar, namun tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan modal tersebut. Pada kasus negara berkembang seperti Indonesia, ketersediaan modal biasanya sangat minim. Untuk mengatasi ketersediaan modal yang dibutuhkan, pemerintah mendatangkan modal dari luar negeri dalam bentuk utang luar negeri dan penanaman modal asing (Khair & Rusydi, 2016). Modal yang dibutuhkan tersebut dapat bersumber dari negara yang sudah maju atau lembaga internasional dalam bentuk utang luar negeri (Harjanto, 2015 dalam AS & Sutjipto, 2018). Cyrillus (2002) berpendapat bahwa sebagian besar negara-negara berkembang memanfaatkan utang luar negeri sebagai pendukung dalam pembangunan negara mereka, meskipun tidak sedikit negara yang justru terjebak di dalam perangkap utang luar negeri (*debt trap*) (Batubara & Saskara, 2015).

Adanya modal dari luar negeri, diharapkan dapat mempercepat pembangunan nasional melalui peningkatan investasi dan mempercepat pertumbuhan. Namun teori ketergantungan utang (*debt overhang theory*) menjelaskan bahwa tingkat utang yang besar justru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah. Hal ini terjadi karena dalam

jangka panjang utang dapat menjadi lebih tinggi dan melampaui kemampuan membayar negara peminjam, biaya pembayaran utang akan mengurangi investasi dalam negeri maupun luar negeri yang akan menghambat pertumbuhan, karena sebagian hasil dari ekonomi tidak akan dinikmati oleh negara tersebut, tetapi harus diberikan kepada negara pemberi pinjaman (Yuniarti, 2005). Utang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi selama utang diproyeksikan dapat mendanai pembayaran kembali utang tersebut (dari hasil investasi utang tersebut). Sebaliknya, jika beban utang tidak dapat dilunasi oleh hasil dari penggunaan utang sebelumnya, maka utang telah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi (Prihandoko, 2017).

Pada awalnya utang luar negeri digunakan sebagai pelengkap untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, utang luar negeri telah menjadi kebutuhan yang mengikat bagi Indonesia. Tingginya jumlah kewajiban utang luar negeri Indonesia saat ini telah menjadi tantangan yang berat bagi perekonomian negara. Beban utang yang terus bertambah, bersamaan dengan proses pemulihan ekonomi yang tidak konsisten, Indonesia telah masuk ke dalam *debt trap* utang luar negeri di mana utang yang baru digunakan untuk menutupi kewajiban utang dan pembayaran bunga. Hal tersebut terjadi karena penerimaan pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan total pengeluarannya, pemerintah menutupi defisit anggaran nasional melalui utang luar negeri. Ketika penerimaan pemerintah gagal untuk membiayai pengeluaran pemerintah, peran utang

luar negeri akan meningkat (Cahyaningrum et al., 2022). Perkembangan utang luar negeri Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 1. 1 Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2015-2021 (Juta US\$)**

Sumber: World Bank, 2023

Dapat dilihat dari gambar 1.1 bahwa tren utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 utang luar negeri Indonesia sebesar US\$ 318.94 juta naik sebesar 3,64% dari tahun 2015. Kenaikan ini salah satunya disebabkan karena pemerintah sedang membuat banyak pembangunan, dan perekonomian Indonesia saat itu belum stabil sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri (Saputro & Soelistyo, 2017). Tahun 2017 utang luar negeri naik sebesar 10,85% menjadi US\$ 353.56 juta dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 yaitu sebesar US\$ 416.47 juta, naik 3,72% dibandingkan sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar US\$ 402.11 juta. Kenaikan utang luar negeri di Indonesia tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemik Covid-19 yang menyerang perekonomian seluruh dunia. Pada tahun 2021 perekonomian perlahan kembali pulih dan utang luar negeri di Indonesia mengalami penurunan sekitar 0,14% yakni sebesar US\$ 416.47 juta dibandingkan tahun 2020.

Secara umum meningkatnya utang luar negeri setiap tahunnya sebagai akibat dari kurangnya anggaran pemerintah dan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perekonomian (Cahyaningrum et al., 2022).

Kenaikan utang luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada sumber pendanaan luar negeri. Jika posisi ketergantungan terhadap modal asing semakin besar pula resiko yang dihadapi oleh sistem ekonomi global. Adanya utang luar negeri dapat memberikan pengaruh dalam jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi, keberadaan utang luar negeri akan mendorong kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu pemerintah dalam mengisi defisit APBN. Namun dalam jangka panjang pemerintah akan mengganggu beban utang dan bunga utang luar negeri yang semakin besar. Peningkatan utang luar negeri akan membebani APBN, karena pemerintah menggunakan APBN untuk membayar utang luar negeri setiap tahunnya. Sehingga hanya Sebagian kecil APBN yang digunakan untuk proses pembangunan.

Tulus (2011:256) memiliki pendapat bahwa neraca perdagangan yang tinggi merupakan penyebab dari besarnya utang luar negeri. Semakin rendah nilai ekspor dan semakin besar nilai impor akan menyebabkan beban utang luar negeri suatu negara semakin meningkat. Hal ini akan melemahkan kemampuan negara tersebut untuk membayar utang luar negerinya dalam jangka panjang. Nilai ekspor yang lebih rendah dari impor

juga akan menyebabkan defisit yang disebabkan karena pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada pendapatan yang diterima. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah terpaksa menggunakan utang luar negeri (Batubara & Saskara, 2015). Grafik berikut menunjukkan perkembangan ekspor di Indonesia dari tahun 2016-2021.



**Gambar 1. 2 Perkembangan Ekspor Indonesia Tahun 2015-2021 (Milyar US\$)**

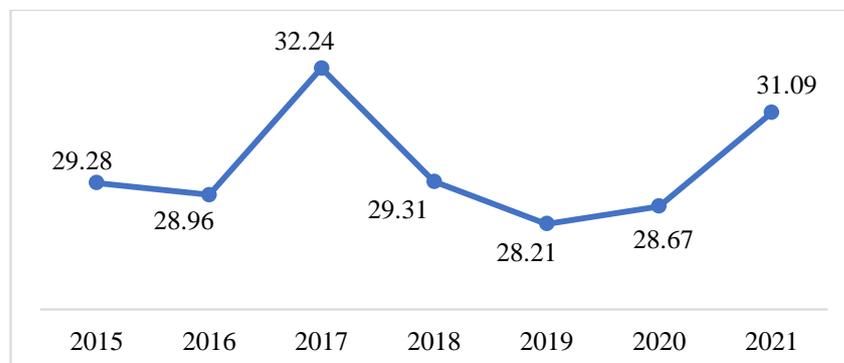
Sumber: World Bank, 2023

Berdasarkan data dari World Bank perkembangan ekspor Indonesia pada tahun 2016 ekspor sebesar US\$ 177.89 milyar, naik sebesar 15,20% pada tahun 2017 menjadi US\$ 204.92 milyar. Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 6,82% menjadi US\$ 218.91 milyar. Namun ekspor terus menurun pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 4,96% dan 12,12% karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan lemahnya ekonomi nasional. Tahun 2021 ekspor Indonesia berhasil mengalami peningkatan sebesar 39,38% menjadi US\$ 255.73 milyar.

Ekspor memiliki peran yang sangat penting bagi negara, karena ekspor merupakan sumber devisa negara. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang digunakan pemerintah untuk melunasi utang luar

negeri, penurunan ekspor dapat menyebabkan rasio utang luar negeri meningkat, dan sebaliknya peningkatan ekspor berpotensi mengurangi tingginya jumlah utang luar negeri. Ekspor merupakan salah satu aspek terpenting dalam kemajuan ekonomi bagi negara berkembang. Peningkatan ekspor dapat meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan ekspor dapat menciptakan devisa yang kemudian dapat digunakan untuk keperluan impor (Ginting, 2017)

Adanya keterbatasan tabungan domestik yang digunakan untuk proses pembangunan menjadi alasan pemerintah menggunakan utang luar negeri sebagai penunjang pembangunan. Namun selain menggunakan utang luar negeri pemerintah juga dapat mengupayakan penanaman modal asing sebagai sumber dana dari luar negeri. Adanya penanaman modal asing diharapkan dapat menggantikan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional. Sehingga ketergantungan terhadap utang luar negeri dapat berkurang (Rudi et al., 2016). Berikut dapat dilihat perkembangan penanaman modal asing di Indonesia.



**Gambar 1. 3 Perkembangan PMA di Indonesia Tahun 2016-2021 (Juta US\$)**

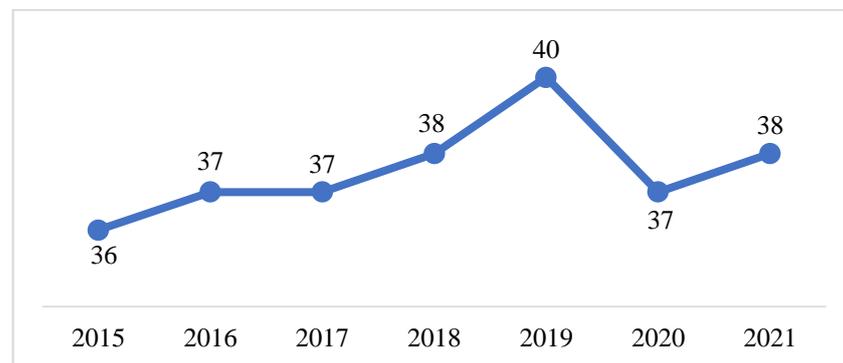
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Berdasarkan gambar 1.4, nilai penanaman modal asing di Indonesia tahun 2016 sebesar US\$ 28.96 juta. Mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 11,31% menjadi US\$ 32.24 juta, terus mengalami penurunan di tahun 2018-2019 sebesar 9,09% dan 3,75%. Kemudian kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 dan 2021 menjadi US\$ 28.67 juta dan US\$ 31.09 juta. Pertumbuhan nilai PMA yang berfluktuatif di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain Indikator makro yang dapat digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara, perkembangan politik dan sistem pemerintahan juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian di setiap negara. Karena sering kali kepentingan suatu kelompok dicampurkan dengan kepentingan negara sehingga menimbulkan penyelewengan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), dari ketiga penyelewengan tersebut korupsi yang menjadi sorotan utama publik (Elfrida & Oktaviani, 2015).

*Transparency International* telah membuat sebuah penelitian mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang menjadi sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi suatu negara atau wilayah (Lambsdorff, 2008). Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala dari 0-100, di mana skala 100 dipersepsikan sebagai kondisi yang rendah dari korupsi, sedangkan skala 0 dipersepsikan sebagai kondisi yang tinggi dari korupsi. Korupsi diyakini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pemerintah

sehingga dapat menyebabkan pemborosan dalam pengeluaran publik. Korupsi yang dinilai dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap utang luar negeri. (Cooray et al., 2017) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara, maka utang yang dimiliki oleh negara tersebut juga semakin tinggi. Berikut perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia tahun 2015-2021.



**Gambar 1. 4 Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Tahun 2015-2021**

Sumber: Transparency International, 2023

Pada tahun 2015 Indonesia memiliki nilai IPK dengan skala 36, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 yang merupakan nilai IPK tertinggi dengan skala sebesar 40, hal ini berarti bahwa pada tahun 2019 Indonesia rendah korupsi serta Indonesia menempati peringkat 85 dari 180 negara dan wilayah berdasarkan tingkat korupsi sektor publik. Sementara itu, untuk skala IPK terendah di Indonesia sebesar 36 pada tahun 2015, ini berarti bahwa korupsi di Indonesia tinggi. Berdasarkan grafik perkembangan indeks persepsi korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa

korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia. Sehingga judul yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Ekspor, PMA, dan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Utang Luar Negeri di Indonesia Tahun 2002-2021”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi Ekspor, PMA, Indeks Persepsi korupsi, dan Utang Luar Negeri di Indonesia Tahun 2002-2021?
2. Bagaimana pengaruh Ekspor, PMA, dan Indeks Persepsi Korupsi secara parsial terhadap Utang Luar Negeri di Indonesia Tahun 2002-2021?
3. Bagaimana pengaruh Ekspor, PMA, dan Indeks Persepsi Korupsi secara bersama-sama terhadap Utang Luar Negeri di Indonesia Tahun 2002-2021?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Ekspor, PMA, dan Indeks Persepsi Korupsi secara parsial terhadap Utang Luar Negeri di Indonesia Tahun 2002-2021.

2. Pengaruh Ekspor, PMA, dan Indeks Persepsi Korupsi secara bersama-sama terhadap Utang Luar Negeri di Indonesia Tahun 2002-2021.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait pengaruh ekspor, PMA, dan indeks persepsi korupsi terhadap utang luar negeri di Indonesia tahun 2002-2021.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Bagi Pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh ekspor, PMA, dan indeks persepsi korupsi terhadap utang luar negeri dan dapat dijadikan masukan serta pertimbangan dalam menentukan kebijakan utang luar negeri.

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis variabel-variabel yang dapat mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan manfaat serta sumber data untuk membantu pemahaman pembaca dalam mengetahui pengaruh ekspor, PMA, dan indeks persepsi korupsi terhadap utang luar negeri di Indonesia tahun 2002-2021.

